
ADMINISTRASI NEGARA

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 36, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 36

Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025

- ABSTRAK:
- Dalam upaya mendorong Perangkat Daerah agar lebih selektif dalam merencanakan program kegiatan dan keuangan, serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, diperlukan adanya standar belanja untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meny stipulasi bahwa analisis standar belanja harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (perkada). Berdasarkan pertimbangan tersebut, dirumuskanlah kebijakan untuk menetapkan Peraturan Bupati mengenai Analisis Standar Belanja untuk Tahun Anggaran 2025.
 - UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 108 Tahun 2000;PP Nomor 71 Tahun 2010;PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 21 Tahun 2021;PERPRES Nomor 33 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019;Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021;
 - Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan kerangka penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan pemerintah yang efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel. ASB dirancang untuk memberikan deskripsi yang jelas dan terperinci mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah, termasuk pengendalian belanja dan alokasi objek belanja. Pasal 5 dan Pasal 6 dari peraturan ini menjelaskan komponen-komponen yang termasuk dalam ASB, seperti deskripsi kegiatan, pengendali belanja, dan

persamaan rumus penghitungan total belanja. Pasal 12 lebih lanjut menguraikan jenis-jenis ASB yang spesifik, mulai dari sosialisasi tatap muka hingga pelatihan pegawai. Pasal 14 menekankan pada kebutuhan untuk mengusulkan besaran belanja yang efisien dan efektif jika kegiatan yang akan dilaksanakan belum dapat disetarakan dalam ASB. Melalui peraturan ini, diharapkan dapat tercipta pengelolaan anggaran yang lebih terkontrol dan transparan, mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

- CATATAN:
- Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024
 - Status Peraturan bupati gresik Berlaku